



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Ketidakpekaan Pejabat di Tengah Derita Korban Bencana
Tanggal	: Jumat, 12 Desember 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 4

Ketidakpekaan Pejabat di Tengah Derita Korban Bencana

Bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran di pemerintahan untuk mengevaluasi sistem penanggulangan bencana serta komunikasi publik yang lebih berempati.

Hidayat Salam

Dalam kesulitan warga menghadapi bencana banjir dan longsor di Sumatera, sejumlah pejabat publik justru mempertontonkan sikap nirempati. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Ketidakpekaan ini sekaliugus memperlhatkan adanya problem tata kelola penanganan bencana.

Pada 2 Desember 2025, ketika dampak bencana banjir dan longsor masih menyulitkan warga, Bupati Aceh Selatan Mirwan bersama keluarganya justru berangkat umrah. Sebelum itu, pernyataan Mirwan lebih dulu viral di media sosial karena menyampaikan ketidaksanggupan menangani dampak bencana di daerahnya.

Alih-alih bersama warganya dalam menghadapi bencana, Mirwan justru meninggalkan mereka. Kepergiannya pun tanpa izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seperti disyaratkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Akibatnya, Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi Mirwan berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Sebelumnya, Partai Gerindra lebih dulu menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Ketidakpekaan Mirwan di tengah kesulitan warganya menghadapi bencana jadi dasar penjatuhan sanksi tersebut.

Namun, tak hanya Mirwan. Setelah bencana di Sumatera terjadi, sejumlah pejabat lain juga memperlakukan ketidakpekaan terhadap bencana yang

telah menewaskan lebih dari 900 orang tersebut. Ironisnya, ketidakpekaan itu sempat dipertahankan pula oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugiantoro yang lembaganya telah dipercaya menjadi tulang punggung saat bencana terjadi.

Di saat awal bencana terjadi, Sugiantoro justru menyatakan bahwa bencana di Sumatera sebatas mencakam di media sosial. Saat ia menyampaikan pernyataan itu, persisnya pada 28 November lalu, masih banyak wilayah terisolasi. Mesih banyak pula warga yang terjebak banjir dan longsor hingga membuatbutuhan evaluasi.

Belakangan, ketidakpekaan juga muncul dari wakil rakyat di DPR. Di tengah kebutuhan cepat para penyintas bencana dan longsor pada bantuan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endiwi Wijaya, justru menyindir bantuan yang datang dari masyarakat. Sindiran blak-blakan disampaikannya dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

"Orang per orang cuma menyumbang Rp 10 miliar (ke daerah bencana), negara sudah triliun-triliun ke Aceh itu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerje di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada yang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal, pemerintah bikin ratusan posko," ujar Endiwi.

Meski tak disebutkan siapa individu yang dimaksudnya, sindiran itu ditangkap mengarah kepada Ferry Irwandi, pemengaruh sekaliugus pendiri Malaka Project. Setelah ben-

ca di Sumatera melanda, Ferry menggalang bantuan dana publik melalui platform Kitabisa. Total donasi mencapai Rp 10,3 miliar dalam 24 jam pertama dengan partisipasi lebih dari 87.000 orang. Ia juga ikut terlibat mendistribusikan bantuan ke para penyintas.

Namun, Ferry merespons biasa cibir dari Endiwi tersebut, bahkan memdaftarkannya. "Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya juga menerimanya itu karena enggak ada gunanya juga memelihara konflik dalam situasi seperti sekarang," ujar Adinda Kamis (11/12).

Sementara Endiwi berasaskan, maksud pernyataannya untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kominfo, terutama soal publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai langkah penanganan bencana oleh negara. Ia mengaku tak berniat mengecilkan peran sukarelawan. Sukarelawan selalu bergerak tanpa pamrih setiap terjadi bencana. Mereka juga bekerja dengan hati, sedangkan negara bekerja dengan kewajiban, dan keduanya penting, tidak boleh dipertentangkan.

"Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan," ujar Endiwi, Selasa (9/12).

Kondisi riil bencana

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar melihat ketidakpekaan para

pejabat itu sekaliugus menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap kondisi riil yang dialami oleh para penyintas bencana. Ketidakpekaan bisa jadi muncul karena mereka selama ini terlalu berorientasi pada pencitraan.

"Jadi, mindset-nya bukan peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungan, tapi malah mengutamakan mana yang paling disorot atau berkemampuan *media exposure* di media sosial atau pencitraan. Jadi, salah kaprah komunikasi publiknya dan menjadi nirempati," tutur Adinda Kamis (11/12).

Ketidakpekaan itu, menurut dia, juga menunjukkan adanya masalah pada tata kelola penanganan bencana yang lambat dan tidak sigap serta tidak tepat sasaran. Kelambanan dan ketidaksiapannya akibat ketidakpekaan pada bencana itu termasuk yang terlilit di level pemerintah pusat.

Meski bencana banjir dan longsor sudah mulai melanda di sejumlah wilayah di Sumatera pada 24 November 2025, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih baru menggelar rapat untuk membahasnya pada 27 November 2025. Setelah itu, penanggulangan bencana baru terlihat lebih cepat di-sertai kunjungan dua kali Presiden Prabowo di daerah bencana pada Senin (0/12) dan Minggu (7/12).

Berangkat dari problem ketidaksiapannya itu, Adinda mendorong agar musibah di Sumatera jadi pelajaran seluruh jajaran di pemerintah untuk mengevaluasi sistem penanggulangan bencana. Ke depan, pemerintah diharapkan lebih cepat membantu masyarakat ketika bencana terjadi.

Yang tak kalah penting, perlunya membangun sistem komunikasi publik yang solid, jelas, dan akurat. Selain itu, dalam situasi bencana, komunikasi publik juga harus empatik.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, juga menyayangkan ketidakpekaan sejumlah pejabat publik di tengah bencana. Mereka dinilai tidak belajar dari kemarahan publik pada akhir Agustus lalu, yang dipicu buruknya komunikasi publik sejumlah pejabat dan ketidakpekaan mereka di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi warga.

Partai politik, menurut dia, ikut andil melahirkan ketidakpekaan karena sebagian pejabat publik yang kontroversial sikap dan pernyataannya saat bencana itu berasal dari parpol. Karena itu, parpol mestinya memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi dengan menerapkan sistem merit dan pendidikan politik yang memumbuhkan sikap negarawan.

"Ini menunjukkan bukan hanya tiadanya kepedaan dan *sense of crisis*, melainkan juga gagalnya representasi politik atau juga bisa jadi mereka tidak ditempat oleh pendidikan politik yang matang," kata Lili.

Musibah di Sumatera mengakibatkan bahwa komunikasi publik yang keliru dan perlaku pejabat yang nirempati hanya memambah luka para penyintas. Pemerintah perlu memastikan bahwa dalam setiap langkah penanganan bencana, hadir kepemimpinan yang sensitif, sigap, dan benar-benar berpihak kepada penyintas.